

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan bisa melanjutkan bisnisnya berdasarkan asumsi *going concern* perusahaan tersebut. *International Accounting Standards* (IAS) 1 mendefinisikan *going concern* dengan menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun dalam asumsi dasar *going concern* kecuali jika manajemen berintensi untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan bisnis atau tidak mempunyai alternatif realistis lain kecuali untuk melakukan hal tersebut (IFRS Foundation, 2021).

Kinerja keuangan dari sebuah perusahaan dapat dilihat melalui kinerja saham, karena pada dasarnya tujuan dari sebuah bisnis adalah untuk menciptakan *value* untuk para pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham. Tujuan ini sering dinyatakan sebagai “maksimalisasi kekayaan pemegang saham.” Oleh sebab itu, tujuan dari manajer keuangan yaitu untuk memperoleh kekayaan untuk *shareholders*, dengan membuat keputusan yang akan memaksimalkan harga dari *common stock* yang ada (Keown et al., 2014). Tandelilin (2010) menyatakan bahwa tujuan investor dalam berinvestasi yaitu untuk memaksimalkan *return*, tetapi tidak mengabaikan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. *Return* termasuk salah satu

faktor yang mendorong investor untuk berinvestasi serta merupakan imbalan atas risiko investasi yang berani dihadapinya.

Pernyataan bahwa reputasi sebuah perusahaan merupakan elemen kunci untuk meningkatkan kinerja keuangan telah diterima secara luas dalam literatur (Nirino et al., 2021). Persepsi negatif para pemangku kepentingan terhadap perusahaan dapat menyebabkan bermacam-macam konsekuensi, seperti tuntutan hukum, kerugian pendapatan, risiko finansial yang meningkat dan peningkatan biaya hutang (Nirino et al., 2021). Reputasi perusahaan dapat dilihat melalui persepsi para *stakeholders* terhadap respon perusahaan terhadap isu-isu terkini serta kemampuannya dalam meningkatkan kinerja. Salah satu isu terkini yang sedang menjadi tren di dunia yaitu *sustainability*.

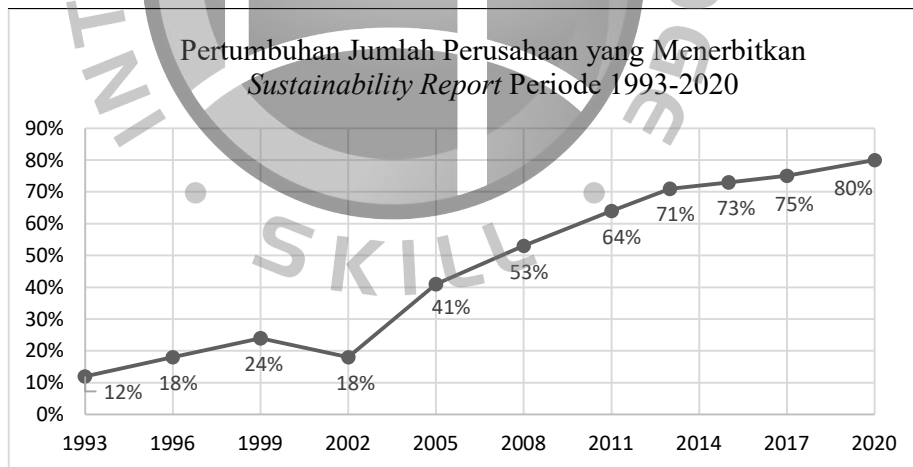
Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dirancang oleh PBB (UNSDG) menjadi sorotan bagi dunia internasional pada masa kini. UNSDG memiliki 17 target yang memperhatikan tentang kemiskinan, ketidaksetaraan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian serta keadilan (sumber: sdgs.un.org). Target ini mempromosikan penerapan *sustainability* untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pada tahun 2030 mendatang.

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* merupakan salah satu sarana perusahaan untuk melegitimasi upaya dan kebijakan yang telah dilakukan serta mengungkapkannya kepada para pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan menyajikan informasi non keuangan

perusahaan yang menjelaskan tentang aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan (Buallay, 2020).

Menurut *Global Reporting Initiatives*, Dimensi ekonomi dari keberlanjutan berkaitan dengan dampak perusahaan pada kondisi ekonomi dari para pemangku kepentingannya, dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dimensi lingkungan dari keberlanjutan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem serta dimensi sosial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, HAM, masyarakat dan tanggung jawab atas produk.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Jumlah Perusahaan yang Menerbitkan *Sustainability Report*



Sumber: *The KPMG Survey of Sustainability Report* (2019)

The KPMG Survey of Sustainability Report 2020 memperlihatkan tren jumlah perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*. Survey tersebut menggunakan 100 perusahaan terbesar berdasarkan sumber

nasional yang diakui atau kapitalisasi pasar serta pengukuran sejenis lainnya dalam 52 negara dan yurisdiksi. Struktur perusahaan yang termasuk adalah *publicly-listed and state, private dan family-owned*.

Perusahaan yang termasuk dalam sampel survey tersebut yaitu 19% perusahaan Amerika, 44% perusahaan Eropa, 12% perusahaan Timur Tengah & Afrika serta 25% perusahaan Asia Pasifik. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai macam bidang, di antaranya adalah dalam bidang jasa keuangan 19%; teknologi, media dan telekomunikasi 10%; industrial, manufaktur dan logam 10%; retail 9%; Food & Beverages 8%; transportasi 7%; otomotif 7%; *oil & gas* 5%; *utilities* 5%; konstruksi & bahan bangunan 5%; kesehatan 4%; *personal & household goods* 3%; bahan kimia 3%; pertambangan 2%; kehutanan & kertas 1% dan lain sebagainya 2%. Survei tersebut menyatakan bahwa terdapat peningkatan tren jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Tren perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* mengalami kenaikan dari tahun 1993 sampai tahun 1999 sebesar 12%. Tren menurun sebesar 6% dari tahun 1999 sampai 2002, kemudian meningkat pesat sampai tahun 2020 sebesar 62%.

Center for Risk Management and Sustainability dalam Survei Nasional ESG (2019) mengemukakan bahwa walaupun Indonesia turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan penerapan ESG, keikutsertaan antar perusahaan masih sangat kurang. Dari keseluruhan responden, hanya 15,8% menjawab bahwa organisasinya telah memiliki pedoman khusus

yang berlaku terkait pertimbangan kriteria ESG terhadap pengambilan keputusan di organisasi. Kurangnya keikutsertaan perusahaan dalam mengimplementasikan ESG akan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat luas.

Laporan bersama yang diterbitkan oleh *Rainforest Action Network* (RAN), TuK Indonesia, Jikalahari, WALHI dan Profindo menyatakan bahwa setidaknya 850.000 hektar hutan dan lahan hangus dalam bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2019. Asap dari bencana karhutla tersebut tidak hanya berdampak kepada Indonesia tetapi juga kepada negara tetangga. Pemerintah berasumsi bahwa 80% penyebab kebakaran tersebut merupakan tindakan yang disengaja untuk membuka lahan perkebunan sawit. Dalam merespon hal ini, pemerintah pun menyegel 83 perusahaan perkebunan.

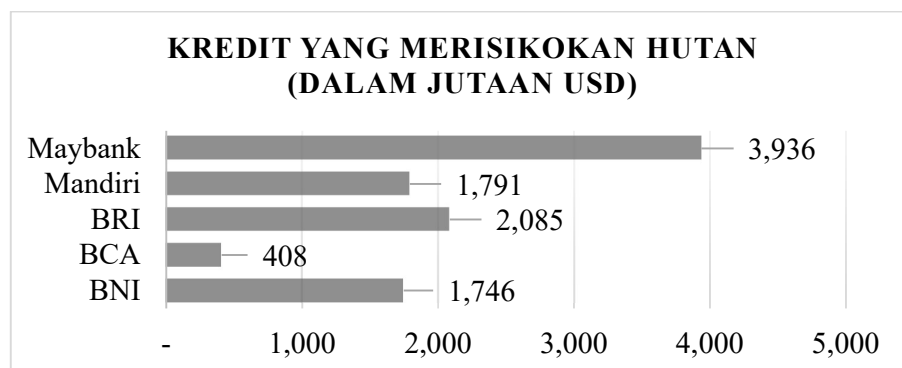
Sektor perkebunan dan kehutanan merupakan industri yang beresiko tinggi dalam mengancam kelestarian hutan dan lingkungan. Upaya pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri tersebut terhambat karena sektor tersebut tetap dapat beroperasi dengan gencar akibat dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan tanpa adanya pengecekan standar legalitas atau keberlanjutan perusahaan, serta tanpa klausul atas kinerja *sustainability* seperti pencegahan kebakaran atau restorasi lahan gambut.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang turut mendanai sektor-sektor yang berdampak besar terhadap lingkungan. Industri perbankan memang bukan pencemar utama lingkungan, tetapi perusahaan perbankan perlu mengalokasikan sumber daya untuk digitalisasi proses internal guna meningkatkan efisiensi biaya dan menawarkan produk serta layanan baru. Lembaga keuangan perlu terlibat dalam mendukung upaya produksi yang lebih bersih di industri non-perbankan, karena minat terhadap ESG atau *sustainability report* semakin meningkat

Perbankan merupakan industri esensial yang sangat berperan dalam ekonomi nasional maupun global. Dalam menjalankan bisnisnya, bank memerlukan kepercayaan nasabah, reputasi yang baik, serta profitabilitas. Oleh karena itu, bank harus dapat memperluas komitmen lingkungan, inisiatif pertanggungjawaban sosial, dan kebijakan kualitas tata kelola sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabah dan mitra bisnisnya (Bätae et al., 2021).

Gambar 1.2

Kredit yang Merisikokan Hutan



Sumber: Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan (2019)

Menurut data yang diperoleh dalam Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan (2019), terdapat lima bank terbesar di Indonesia yang turut andil dalam mendanai perusahaan yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan kerusakan lingkungan khususnya pada hutan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain bergerak di bidang *property*, perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan lainnya. Jika diakumulasikan, dana kredit yang telah disalurkan oleh bank-bank tersebut sejak tahun 2015 sampai 2019 kepada perusahaan atau proyek yang meresikokan hutan mencapai USD 9,966 juta. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, sosial serta tata kelola oleh pihak yang bersangkutan.

Regulator finansial dan bank sentral di dunia internasional semakin sadar bahwa manajemen dan pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, disingkat LST (*Environmental, Social and Governance/ESG*) dalam membuat keputusan atas pemberian kredit selain sangat penting bagi keberlanjutan, juga dianggap vital dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan finansial yang cakupannya lebih luas.

WWF *Sustainable Banking Regulations in ASEAN - Raising the Bar report* pada Desember 2019 menemukan bahwa 6 negara ASEAN sudah mengeluarkan peraturan wajib atau pedoman sukarela tentang *sustainable banking* (WWF, 2020). Perkembangan di ASEAN sejak saat itu meliputi:

1. Pada September 2019, Bank Negara Malaysia dan *Securities Commission Malaysia* membentuk suatu Komite Bersama untuk

Perubahan Iklim (*Joint Committee on Climate Change* atau JC3), untuk bekerja meningkatkan ketahanan sektor keuangan Malaysia terhadap risiko terkait iklim melalui empat sub komite: *risk management, governance & disclosure, product & innovation*, dan *engagement & capacity building*. Khususnya, proyek ini mencakup penciptaan taksonomi berbasis prinsip untuk mendefinisikan kegiatan (tidak) berkelanjutan, diproyeksikan untuk dirilis pada awal 2021.

2. Pada April 2020, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) Filipina mengeluarkan Kerangka Keuangan Berkelanjutan, menetapkan ekspektasi pada integrasi prinsip berkelanjutan ke dalam strategi, operasi, tata kelola, dan sistem manajemen risiko bank-bank di Filipina.
3. Pada Juni 2020, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengeluarkan Pedoman tentang Manajemen Risiko Lingkungan untuk konsultasi publik, juga merinci ekspektasi untuk bank, perusahaan asuransi, dan manajer aset.

Meski bukan regulasi, pemerintah Jepang dan Korea sudah berjanji untuk mengurangi emisi ekonomi mereka sampai *net-zero* pada tahun 2050, tujuan yang selaras dengan target yang ditetapkan oleh Uni Eropa pada tahun 2019. Layanan Pengawasan Keuangan Korea mengumumkan rencana untuk melakukan *climate stress-testing* di sektor keuangan Korea, mengikuti rekomendasi dari *Network for Greening the Financial System* (NGFS). Dengan komitmen Cina untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, tiga ekonomi Asia terbesar sekarang sudah mendeklarasikan

target *net-zero* (WWF, 2020). Hal ini menjadi contoh yang kuat bagi pemerintah negara-negara lain di Asia untuk mengikuti dan bisnis (termasuk institusi finansial) yang beroperasi dalam negara-negara ini harus bersiap-siap untuk perubahan peraturan di masa yang akan datang.

Regulator perbankan di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan pun melakukan upaya penerapan keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. POJK tersebut diterbitkan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi dari UU No. 32 Tahun 2009 mencakup kebijakan yang ramah lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

OJK mengeluarkan Surat Edaran (SE) OJK No. 16 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) bagi emiten dan perusahaan publik sesuai dengan POJK 51 Tahun 2017. Menurut SE OJK No. 16 Tahun 2021, laporan keberlanjutan merupakan laporan kepada masyarakat tentang kinerja keberlanjutan yang terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Laporan Keberlanjutan dianggap pula sebagai akuntabilitas dan transparansi Emiten dan Perusahaan Publik atas dampak operasinya terhadap ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Laporan Keberlanjutan dipandang sebagai media yang menyajikan informasi terkait

kontribusi Emiten dan Perusahaan Publik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Untuk menghasilkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang efektif, Emiten dan Perusahaan Publik didorong untuk menggunakan 8 (delapan) prinsip sebagai panduan, yaitu prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh OJK mencakup 19 kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Kebijakan Payung Keuangan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Juli 2017 merupakan loncatan yang besar bagi *roadmap* tersebut, yang mengenalkan berbagai persyaratan seperti preparasi rencana kegiatan keuangan berkelanjutan dan *sustainability reporting* untuk bank-bank besar. OJK juga sudah menciptakan beberapa inisiatif untuk mendukung adopsi lebih lanjut lagi mengenai praktek *sustainable* pada sektor perbankan, termasuk mendirikan Forum Keuangan Berkelanjutan dan *Sustainable Finance Award* tahunan (sumber: ojk.go.id).

Penelitian Bătae, *et al* (2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengurangan emisi dan kinerja finansial yang diproksikan dengan ROA, ROE, *Stock market returns*, serta Tobin's Q. Sedangkan Saygili, *et al* (2021) menyatakan bahwa pengungkapan

lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan melalui ROA dan Tobin's Q. Menurut hasil penelitian Buallay (2019), terdapat pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap ROA dan Tobin's Q, kinerja sosial berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE dan Tobin's Q, sedangkan kinerja tata kelola berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE dan berpengaruh positif terhadap Tobin's Q.

Al-Dhaimesh & Al Zobi (2019) dan Rehman, *et al* (2020) menyatakan bahwa kinerja ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian El Khoury, *et al* (2021) terdapat hasil yang menyatakan bahwa kinerja tata kelola berpengaruh negatif terhadap kinerja akuntansi sementara kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *market return*. Hasil penelitian lain oleh Abdi, *et al* (2021), menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam aktivitas lingkungan dan sosial meningkatkan efisiensi finansial secara positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husada & Handayani (2021) menyatakan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh simultan terhadap ROA. Hasil penelitian (Safriani & Utomo, 2020) menunjukkan bahwa pengungkapan ESG mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional dan finansial. (Syafrullah & Muharam, 2017) menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan tapi positif terhadap *abnormal return*, kinerja sosial dan tata kelola berpengaruh signifikan dan positif terhadap *abnormal return*.

Penelitian ini menelusuri bagaimana pengaruh dari *sustainability report* sebagai variabel independen terhadap *Corporate Financial Performance* yang diproksikan dengan *price earnings ratio* sebagai variabel dependen, khususnya pada perusahaan perbankan konvensional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel kontrol *Bank-specific* (Batae et al., 2021), yaitu *Bank size* dan *Capital Adequacy Ratio*.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini berfokus kepada aspek-aspek *sustainability report* serta pengaruh pengungkapan *sustainability report* terhadap *Corporate Financial Performance*. Sampel dari penelitian ini yaitu perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan serta *sustainability report* pada periode 2016-2019. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *corporate financial performance* yang diproksikan menggunakan *price earnings ratio* dan variabel independen pada penelitian ini yaitu *sustainability report* yang diproksikan dengan pedoman SE OJK No. 16 Tahun 2021. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol *bank-specific* untuk mengontrol karakteristik bank yang dapat mempengaruhi *price earnings ratio*, yaitu *Bank Size* dan *Capital Adequacy Ratio*.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kepedulian akan aspek-aspek keberlanjutan di Indonesia yang tercermin dari rendahnya keikutsertaan antar perusahaan dalam implementasi ESG.
2. Adanya pemberian kredit dalam jumlah besar untuk proyek-proyek yang merisikokan hutan yang disalurkan oleh beberapa bank di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Sustainability Report* Dimensi Ekonomi berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance*?
2. Apakah *Sustainability Report* Dimensi Lingkungan berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance*?
3. Apakah *Sustainability Report* Dimensi Sosial berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance*?

1.5 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengungkapan *sustainability report* terhadap *corporate financial performance*. *Sustainability report* merupakan variabel independen pada penelitian ini yang diprosikan menggunakan pedoman SE OJK No. 16 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *corporate financial performance* (CFP). Variabel CFP diprosikan menggunakan *price earnings ratio*. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2016-

2019 serta menerbitkan laporan keuangan dan *sustainability report* atau laporan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberi bukti empiris terkait pengaruh pengungkapan *sustainability report* terhadap *corporate financial performance*. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran institusi khususnya perusahaan perbankan terhadap penerapan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memberi wawasan kepada para investor yang dapat membantu keputusan dalam berinvestasi serta menambah ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak.

1.7 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan tambahan literatur di Indonesia terkait dengan pengaruh pengungkapan *sustainability report*.

2. Kontribusi Praktik

Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengungkapan *sustainability report* di dalam laporan tahunan atau di dalam laporan keberlanjutan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai informasi tambahan bagi para investor dalam membuat keputusan investasi.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I Pendahuluan

BAB I Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah pada penelitian, tujuan penelitian ini dibuat, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

BAB II Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis menjelaskan tentang landasan teori terkait masalah pada penelitian ini dan hasil penelitian yang relevan. Ada pula kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan tinjauan pustaka untuk menganalisis dan memecahkan masalah.

3. BAB III Metodologi Penelitian

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan metodologi apa yang digunakan dalam penelitian yang mencakup desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel, teknis pengolahan dan analisis data serta teknis pengujian hipotesis.

4. BAB IV Analisis Pembahasan

BAB IV Analisis Pembahasan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian, dan implikasi manajerial.

5. BAB V Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan

BAB V Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan berisi kesimpulan dari penelitian, saran serta keterbatasan yang terdapat pada penelitian.

